

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik global Tiongkok dalam merespons *Middle Way Approach* (MWA) yang diajukan oleh Dalai Lama ke-14 dengan dukungan internasional menggunakan kerangka Two-Level Game Theory Robert Putnam. Berdasarkan hasil penelitian, Secara konseptual, moderasi tuntutan dan meningkatnya dukungan internasional seharusnya membuka peluang kompromi antara kedua pihak. Namun, pemerintah Tiongkok tetap mempertahankan penolakannya secara konsisten terhadap MWA selama lebih dari tiga dekade. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perubahan strategi politik Tibet dan respons Tiongkok yang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab mengapa Tiongkok tetap konsisten menolak *Middle Way Approach* meskipun Tibet telah memoderasi tuntutan dan memperoleh dukungan internasional, serta bagaimana dinamika politik domestik dan internasional membentuk respons tersebut.

Pada Level II, politik domestik menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan respons Tiongkok terhadap MWA. Pemerintah Tiongkok memandang Tibet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya serta sebagai salah satu *core interest* negara yang tidak dapat dinegosiasikan. Kepentingan untuk menjaga legitimasi Partai Komunis Tiongkok (PKT), mempertahankan prinsip *One China*, menjaga integritas teritorial, serta mencegah munculnya preseden bagi wilayah sensitif lainnya seperti Xinjiang dan Mongolia Dalam membatasi ruang kompromi pemerintah dalam merespons tuntutan Tibet.

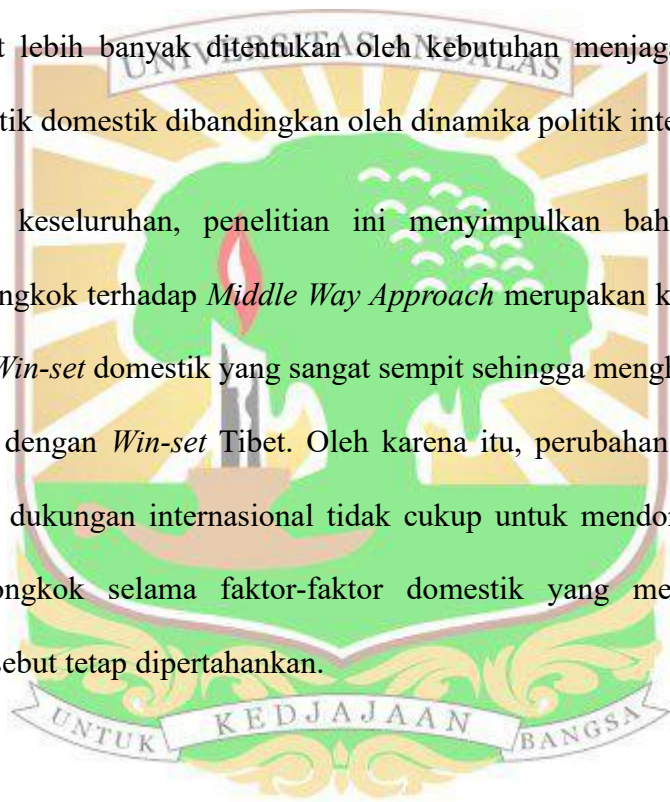
Kondisi tersebut membentuk *Win-set* Tiongkok yang sangat sempit, sehingga alternatif kebijakan yang dapat diterima secara domestik menjadi sangat terbatas.

Sementara itu, pada Level I, Dalai Lama melalui *Middle Way Approach* telah menunjukkan perubahan strategi politik dengan meninggalkan tuntutan kemerdekaan dan mengusulkan Genuine Autonomy yang tetap mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Pergeseran tersebut memperluas *Win-set* Tibet karena menunjukkan adanya fleksibilitas politik dan membuka ruang kompromi. Selain itu, dukungan dari berbagai aktor internasional terhadap penyelesaian konflik Tibet melalui dialog semakin meningkatkan legitimasi internasional terhadap MWA. Namun demikian, perubahan posisi Tibet dan dukungan internasional tersebut tidak mampu mengubah batas penerimaan domestik Tiongkok.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat *Overlap* antara *Win-set* Tibet dan *Win-set* Tiongkok. Meskipun Tibet telah memperluas ruang komprominya, pemerintah Tiongkok tetap mempertahankan batas kompromi yang sangat sempit sehingga tidak terdapat irisan kepentingan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kondisi ini menghasilkan *Zero Overlap*, yang menjelaskan mengapa seluruh proses dialog antara pemerintah Tiongkok dan utusan Dalai Lama tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang substantif. Dengan demikian, kegagalan dialog bukan disebabkan oleh tidak adanya upaya kompromi dari pihak Tibet, melainkan karena struktur kepentingan domestik Tiongkok tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerima usulan yang diajukan dalam *Middle Way Approach*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan domestik tersebut berfungsi sebagai bargaining constraint sebagaimana dijelaskan dalam *Schelling Conjecture*. Pemerintah Tiongkok menggunakan keterbatasan politik domestiknya sebagai dasar untuk mempertahankan posisi diplomatik bahwa isu Tibet merupakan urusan dalam negeri yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, tekanan dan dukungan internasional terhadap MWA tidak cukup kuat untuk memperluas *Win-set* Tiongkok. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Tibet lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan menjaga stabilitas dan legitimasi politik domestik dibandingkan oleh dinamika politik internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penolakan Tiongkok terhadap *Middle Way Approach* merupakan konsekuensi dari terbentuknya *Win-set* domestik yang sangat sempit sehingga menghasilkan kondisi *Zero Overlap* dengan *Win-set* Tibet. Oleh karena itu, perubahan strategi politik Tibet maupun dukungan internasional tidak cukup untuk mendorong perubahan kebijakan Tiongkok selama faktor-faktor domestik yang membentuk batas kompromi tersebut tetap dipertahankan.



5.2 Saran

Penelitian ini masih berfokus pada analisis respons Tiongkok terhadap *Middle Way Approach* melalui perspektif Two-Level Game Theory Robert Putnam dengan menitikberatkan pada interaksi antara dinamika politik domestik dan internasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan perspektif teori lain, seperti

Constructivism, Foreign Policy Analysis (FPA), atau Securitization Theory, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan identitas, persepsi ancaman, serta proses pengambilan keputusan dalam kebijakan Tiongkok terhadap Tibet.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan analisis dengan mengkaji perkembangan kebijakan Tiongkok terhadap Tibet pada era kepemimpinan Xi Jinping, khususnya setelah terhentinya dialog resmi dengan utusan Dalai Lama. Kajian tersebut dapat menyoroti bagaimana perubahan lingkungan strategis, peningkatan nasionalisme, dan dinamika persaingan geopolitik memengaruhi peluang penyelesaian konflik Tibet di masa depan.

Terakhir, penelitian ini hanya berfokus pada hubungan antara pemerintah Tiongkok dan Dalai Lama melalui *Middle Way Approach*. Penelitian berikutnya dapat melakukan studi komparatif dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Xinjiang atau Hong Kong, untuk mengidentifikasi apakah pola pembentukan *Win-set* domestik dan respons kebijakan Tiongkok terhadap tuntutan otonomi menunjukkan karakteristik yang konsisten. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara politik domestik dan kebijakan luar negeri Tiongkok dapat dikembangkan secara lebih luas dan mendalam.